BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, karena tingkat teknologi yang semakin canggih, hal itu menuntut perusahaan dapat bersaing dengan sehat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat tujuan tersebut, agar dapat mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus didorong lebih transparan, profesional dan efisien melalui pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap *stakeholders*.

Peristiwa kecurangan memberi kesadaran bahwa regulasi dan standar akuntansi yang sudah dirancang secara ketatpun belum mampu mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. *Institut of Internal Auditors* (IIA) dalam Sawyers (2005:339) dalam Fitriatil Husna (2013:2) menyebutkan bahwa kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu.

Tindakan ini sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi yang dilakukan baik oleh orang dalam maupun luar organisasi tersebut. Namun kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan yang merupakan tindakan yang merugikan perusahaan itu sendiri.

Tindakan kecurangan memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan karena perusahaan yang terlibat dalam kecurangan sering mengalami kebangkrutan, delisting dari bursa efek, atau melakukan penjualan asset yang material dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat kecurangan, sehingga perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut.

Empat faktor pendorong seorang melakukan kecurangan yaitu: *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *exposure* (disebut faktor generik/umum) yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban tindakan kecurangan yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern. Sedangkan faktor *greed* dan *need*

(disebut faktor individual) yang berhubungan dengan perilaku yang melekat pada diri seseorang.

Perhatian dunia usaha terhadap tata kelola perusahaan meningkat sejak negara negara di Asia dihantam krisis ekonomi. Terbongkarnya skandal akuntansi pada Enron Corp, World Com dan beberapa perusahaan publik Amerika Serikat yang terjadi di sekitar tahun 2001 dan 2002 telah membuat profesi akuntan publik kehilangan kepercayaan dari masyarakat dunia usaha. *Securities and Exchange Commission* (SEC), lembaga independen yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek pada bursa efek Amerika Serikat, SEC mempublikasikan dalam situsnya mengenai skandal akuntansi yang terjadi secara online setiap harinya pelanggaran yang dilakukan emiten pada bursa efek di Amerika Serikat yang dikenal memiliki organisasi asosiasi profesi akuntansi yang maju, khususnya *American Institut of Certificated Public Accountant* (AICPA), ternyata juga masih banyak mengalami penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Gusnardi 2009).

Adanya kasus skandal akuntansi yang terjadi di Amerika Serikat tersebut ternyata juga terjadi di Indonesia. Adapun pernyataan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan sering menemukan kecurangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba yang sebenarnya. Menurut wakil ketua BPK Hasan

Bisri saat diskusi terbatas di gedung BPK, pihaknya masih banyak menemukan BUMN melakukan rekayasa akuntansi, agar labanya terlihat lebih besar sehingga mendapatkan *reward* atau bonus. Soal mereka bayar pajaknya akan lebih besar, itu tidak masalah. Kecurangan itu telah berlangsung sejak lama dan merupakan modus kuno. Akuntan publik yang dipercaya melakukan perhitungan akuntansi ini juga diduga ikut menutupi kecurangan tersebut. Ini modus kuno dan sering akuntan publik itu tidak melakukan koreksi, ini masih banyak ditemui. BPK juga menemukan kecurangan dan pelanggaran hukum yang banyak ditemui pada perbankan BUMN dengan membuat laporan seolah perusahaan mengalami kerugian besar. Lagi-lagi, peran akuntan publik tidak berjalan dengan baik. Perusahaan perbankan itu banyak yang kolaps karena banyak melakukan pelanggaran hukum, sedang akuntan publik tidak membuka itu. Namun ketika dibuka oleh akuntan publik asing ini terbongkar. Ini semua baru diketahui ketika BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) mengerahkan lembaga akuntan asing. Bisri berharap dengan keterlibatan BPK dalam mengoreksi lembaga akuntan publik, aksi kecurangan oleh BUMN dan akuntan publik dapat dikurangi dan yakin sekarang akuntan publik akan lebih hati-hati, karena kalau terbukti terjadi kecurangan, BPK akan melaporkan ini dan bisa minta pemerintah untuk mencabut izin usaha dari lembaga akuntan publik tersebut.

<http://bisnis.liputan6.com/read/690613/bumn-masih-sering-curang>

Tingginya kecurangan pada pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan besar mendorong perusahaan publik untuk mengambil peran proaktif untuk mencegah kecurangan. Strategi ini harus dikembangkan untuk mendorong pencegahan kecurangan, integritas serta efektifitas dan fungsi dari audit.

Manipulasi Laporan Keuangan PT. KAI. Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan

seksama, ditemukan adanya kejangalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 :

Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

www.antarnews.com

Menurut Tuanakotta (2007:162) Pencegahan *fraud* (kecurangan) dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya. Banyak organisasi tidak memiliki upaya untuk menghadapi fraud dengan pendekatan proaktif. Ketika fraud terjadi dalam suatu organisasi harus menghadapi suatu dilema. Apabila terjadi dugaan *fraud*, umumnya banyak organisasi menyelesaikannya secara internal tanpa mau dipublikasikan. Selanjutnya kasus ditutup dan masalahnya dianggap selesai.

Menurut Hery (2014:11) Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan, penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi dan usaha yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah kecurangan (*fraud*) diantaranya menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud* dan pengawasan oleh komite audit. *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (*world bank*).

GCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses, bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. (GCG *workshop* kantor meneg PMPBUMN, 1999)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fitriatil Husna (2013) dengan judul pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan implementasi *good corporate governance* terhadap kecurangan dan penelitian Gusnardi (2009) dengan judul pengaruh peran komite audit, pengendalian internal, audit internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan terhadap pencegahan kecurangan.

Pada penelitian Gusnardi (2009) menjelaskan bahwa, peran pengendalian internal dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, artinya peran optimal penerapan pengendalian internal dan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Dan pada penelitian Fitriatil Husna menyatakan Penerapan *good corporate governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel Pengendalian Internal dan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen dan Pencegahan Kecurangan sebagai variabel dependen. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis ajukan adalah penelitian dilaksanakan pada BUMN yang berada di kota Bandung dan tidak menggunakan peran komite audit dan audit internal sebagai variabel independennya.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul
“**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (STUDI KASUS PADA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) BANDUNG**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, makarumusan masalah yang akan diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Pengendalian Internal pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung
2. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung
3. Bagaimana pencegahan kecurangan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung
4. Seberapa Besar Pengaruh Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan kecurangan baik secara parsial maupun simultan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Pengendalian Internal pada PT. Dirantara Indonesia (Persero) Bandung.
2. Untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Dirantara Indonesia (Persero) Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Pencegahan Kecurangan pada PT. Dirantara Indonesia (Persero) Bandung.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan baik secara parsial maupun simultan pada PT. Dirantara Indonesia (Persero) Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh

dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman mengenai penerapan pengendalian internal dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan guna untuk memenuhi syarat mengikuti Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh antara Penerapan Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* dan Pencegahan Kecurangan, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dengan permasalahan tersebut dengan ilmu yang diteliti.

3. Bagi Manager Perusahaan

Agar memotivasi manajemen perusahaan guna untuk menerapkan Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* sehingga Pencegahan Kecurangan dapat dilakukan dengan baik.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih menjaga dan memperhatikan yang berhubungan dengan Penerapan Pengendalian Intenal dan *Good Corporate Governance* dan Pencegahan Kecurangan.

5. Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada diperusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 154 Bandung Indonesia, dengan waktu penelitian selama satu bulan dari waktu penelitian yang telah ditetapkan